

STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANGANDARAN  
KABUPATEN CIAMIS

Ira Ratna Wulan, Turtiantoro, Wiwik Widayati\*)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Abstraksi :

*Hasil penelitian menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia dari aparaturnya pemerintah, kurangnya dana yang diberikan pemerintah pusat dalam mengembangkan wisata Pangandaran dan tidak adanya kerjasama dari pihak swasta dalam skala besar di daerah wisata Pangandaran. Dianalisis SWOT ditawarkan sebuah strategi pengembangan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Daerah mengaktifkan kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan membentuk kelompok sadar wisata dalam mengelola wisata Pangandaran sebagai wisata alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Untuk penelitian kedepan difokuskan pada evaluasi sebuah strategi yang ada dengan yang sebelumnya, sehingga ini menjadi lengkap, yakni dari sisi pemerintahan maupun dari sisi publiknya. Pemerintah daerah belum memperhatikan masalah lingkungan, terutama dari segi infrastruktur fisik, untuk mengupayakan pemerintah daerah sebagai fasilitator yang artinya dapat mempercepat pengembangan melalui perbaikan lingkungan lokasi wisata. Peran ini dapat direalisasikan melalui perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada di daerah Pangandaran, selain fasilitator pemerintah daerah juga harus bisa sebagai stimulator yang artinya pemerintah daerah dapat menciptakan strategi pengembangan melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi investor swasta untuk ikut bekerjasama masuk, yaitu dengan cara pemerintah daerah bekerjasama dengan investor swasta untuk mempromosikan tema ataupun bentuk kegiatan khusus di lokasi "Pangandaran".*

**Kata kunci:** *strategi, obyek wisata, Pangandaran.*

## Abstract

*The research result shows a lack of local Government's role, also a lack of funds from central Government in developing Pangandaran tourism and there is no cooperation in a big scale from private side in the tourist area. The SWOT analysis was offered a development strategy that should be carried out by the local government of Ciamis regency. In connection with this, the local Government streamlines cooperation with local community and formed aware of tourism group in managing Pangandaran tourism as a nature tourist that cannot be found in other areas. For future research is focused on the evaluation of an existing with the previous strategy, so this can be completed, that is from the side of the Government as well as the side of the public. The local government has not been paying attention to environment issues, especially in terms of physical infrastructure to endeavor local Government as a facilitator which means it can accelerate development through the environmental tourist site improvement. This role can be realized through improvements of the planning procedure and assignment rules. Therefore the things that required is the availability of a distinct purpose so that local Government can be focus on exploit the natural resources that already existing in Pangandaran's area. Beside as a facilitator the local Government also has to be a stimulator which means they can create development strategy through the special measures that can affect the private investor to join partners that is by the local Government corporate with private investor to promote special theme or other events in the area of "Pangandaran".*

**Keywords:** *strategy, tourism object, Pangandaran.*

## **I. PENDAHULUAN**

Di era otonomi daerah seperti saat ini, wilayah pemerintahan yang memiliki aset-aset unggulan seperti pariwisata atau pertambangan jika dikelola dengan baik dapat memberikan pendapatan yang besar bagi daerahnya. Salah satu daerah di Indonesia yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utamanya adalah Kabupaten Ciamis dengan wisata pantai Pangandarannya.

Pangandaran merupakan salah satu obyek wisata andalan kabupaten Ciamis dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah. Tetapi, meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, Pangandaran tidak terlepas dari sejumlah faktor masalah. Pada tanggal 17 Juli 2006, Pangandaran dan sejumlah wilayah pesisir selatan pantai pulau Jawa terkena bencana gempa bumi dan tsunami. Tidak hanya korban jiwa, sebagian besar fasilitas pendukung fisik wisata seperti hotel, wisma, *homestay* dan rumah makan mengalami kerusakan parah. Bahkan kawasan ini merupakan daerah yang mengalami bencana paling parah.

Masalah lain yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis kurang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal manajemen pengelolaan tempat pariwisata. Selain itu dana yang dikucurkan baik oleh pengambil kebijakan daerah setempat maupun Pemerintah Pusat masih dirasa minimal.

Penyusunan strategi pengelolaan obyek wisata Pangandaran yang baik perlu dilakukan karena Pangandaran telah menjadi aset andalan Kabupaten Ciamis agar potensinya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

### **A. TUJUAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah, swasta, masyarakat dalam usaha pengembangan obyek wisata Pangandaran?
2. Bagaimana strategi yang seharusnya digunakan pemerintah daerah sebagai usaha pengembangan obyek wisata Pangandaran?

### **B. TEORI**

#### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional (Silalahi, 2002: 10-11). Oleh karena itu keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah pusat termasuk sumber daya manusianya dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional.

George (dalam Boedi Dewantoro, 2001: 139-140) menerangkan adanya hakikat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu berbicara tentang pemenuhan anggaran, namun harus bicara tentang berbagai hal yang kita orientasikan untuk kesejahteraan rakyat, baik itu menyangkut soal sumberdaya manusia yang ada di pemerintahan, maupun soal daya dukung yang lainnya. Pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Namun

menjadi tanggungjawab seluruh komponen dan kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu, untuk memberikan dukungan positif dari pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah termasuk di dalamnya DPRD, perlu memberikan dukungan yang lebih terbuka dan transparan, serta perlu memberikan daya dukung yang kuat, agar otonomi daerah bisa benar-benar terwujud.

## 2. Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*bussines*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996: 118-119).

Untuk menjelaskan mengenai pengembangan pariwisata, Selo Soemardjan (dalam Spillane, 2001 :133) menyatakan : pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

## 3. Obyek Wisata dan Pengembangan Obyek Wisata

Pengertian obyek wisata dalam Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab I pasal 4.6 menyebutkan obyek wisata dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Selanjutnya dalam Bab III pasal 4 disebutkan: (1) Obyek dan daya tarik wisata terdiri atas: (a) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; (b) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan, taman rekreasi dan tempat hiburan. (2) Pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b.

Gamal Suwanto (1997: 57) menulis mengenai pola kebijakan pengembangan obyek wisata yang meliputi: (a) Prioritas pengembangan obyek; (b) Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan; (c) Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata.

## 4. Manajemen (Pengelolaan) Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox (dalam Pengantar Ilmu Pariwisata, 2009: 81), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan; (2) Proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata; (3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal; (4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan sosial; (5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau aksesibilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 5. Strategi

Chandler (1962) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan atau organisasi, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Porter (1985), mengartikan strategi sebagai alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam Salusu, 2005 :101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi yang keseluruhannya disebut *Master Strategy*, adapun dalam *Master Strategy* tersebut terdiri atas : (1) *Enterprise Strategy*, yaitu yang berkaitan dengan respon masyarakat yang mana strategi ini menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat; (2) *Corporate Strategy*, yaitu yang berkaitan dengan misi organisasi, bagaimana misi itu dijalankan memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi; (3) *Business Strategy*, strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat; (4) *Functional Strategy*, strategi ini merupakan pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada 3 jenis strategi fungsional yaitu : (a) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat; (b) Strategi fungsional manajemen yaitu mencakup fungsi-fungsi manajemen; (c) Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

## **C. METODE**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek atau subyek amatan. Data yang diperoleh meliputi transkrip *interview* (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain (Sudarwan Danim, 2002:51).

### **2. Fokus Penelitian**

Di dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang peran pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan objek wisata Pangandaran dan juga strategi apa yang digunakan pemerintah dalam pengembangan tersebut.

### **3. Subyek Penelitian (Informan)**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan dari pihak swasta, masyarakat di sekitar kawasan Pangandaran, serta dari instansi-instansi terkait dalam upaya pengembangan obyek wisata Pangandaran, seperti Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Ciamis, UPTD Pariwisata Pangandaran, dan camat Pangandaran.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang akan dikumpulkan berupa :

- a. Data Primer : hasil wawancara dan observasi.
- b. Data Sekunder : diperoleh melalui studi kepustakaan berupa laporan-laporan penelitian, media massa, dan buku-buku lain yang mendukung penelitian ini.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam melakukan penelitian peneliti mengumpulkan data dengan metode :

1. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan (Subagyo, 2004: 31).
2. Dokumentasi , Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (1990:161) dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film baik yang disiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*.

### **6. Analisis Data**

Melalui penelitian ini akan diperoleh data kemudian dianalisis berdasarkan kajian teoritis dengan mempertimbangkan pendapat, pemikiran, persepsi, dan interpretasi dari pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian, kemudian kajian dilanjutkan dengan melakukan analisis dengan pendekatan manajemen strategis. Analisis data merupakan tindak lanjut setelah melakukan pengumpulan data.

Penelitian kualitatif pada umumnya lebih menekankan pada hal eksplorasi, pengungkapan, dan logika yang bersifat induktif. Peneliti berupaya menyikapi dengan akal sehat suatu situasi tanpa mengedepankan harapan yang sudah diduga sebelumnya perihal latar belakang program (Patton, 2006). Selanjutnya alat yang dapat dipakai dalam analisis data yaitu analisis SWOT.

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pangandaran

#### 1. Perbaikan Sistem Manajemen

Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperbaiki sistem manajemen dengan cara promosi karena dengan promosi yang baik maka minat wisatawan untuk berkunjung akan semakin bertambah.

#### 2. Restrukturisasi

Restrukturisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis adalah dengan pengembangan pariwisata melalui pembinaan terhadap obyek dan daya tarik wisata.

#### 3. Pemberdayaan Masyarakat

(1) Penyuluhan dan pembinaan dalam pembuatan cinderamata, tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang pengembangan kepariwisataan dengan cara pembuatan cinderamata untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar objek wisata; (2) Pembentukan KOMPEPAR (Kelompok Peduli Pariwisata) yaitu kepanjangan tangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis yaitu untuk DARWIS (Sadar Wisata) kepada masyarakat; (3) Pembinaan pengembangan usaha di bidang industri pariwisata juga diwujudkan dengan dibangunnya berbagai industri yang mendukung,

### B. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Pangandaran

Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan objek wisata Pangandaran dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa di kawasan objek wisata, antara lain : (1) Jasa penginapan atau hotel; (2) Penyediaan/usaha warung makan dan minum; (3) Penyediaan/usaha toko souvenir/cinderamata di daerah Pangandaran; (4) Jasa pemandu/penunjuk jalan; (5) Fotografi; (6) Menjadi pegawai perusahaan/pengusahaan wisata alam.

### D. Peran Swasta Dalam Pengembangan Pangandaran

Dalam usaha pengembangan pariwisata Pangandaran belum adanya peran swasta (investor) dalam melakukan investasi secara besar-besaran. Namun demikian pemerintah masih menjalin kerjasama dengan pemerintah Jerman melalui *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO). Dimana UNWTO ini membantu menata sejumlah objek wisata di Kabupaten Ciamis termasuk di Pangandaran.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis juga melakukan *road show* ke beberapa kota yang dianggap sebagai daerah wisata, diantaranya yang sudah dilakukan yaitu ke Yogyakarta untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa kalangan (*stakeholder*) yang bisa membawa wisatawan ke Pangandaran. *Stakeholder* tersebut diantaranya adalah Asosiasi Travel Seluruh Indonesia (Asista), PHRI (Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia), para *guide*, dan biro wisata.

Kerjasama lain yang dilakukan dalam skala kecil adalah kerjasama yang dilakukan dengan para wirausaha seperti minimarket, hotel di sekitar kawasan wisata

dan bank. Adanya kerjasama tersebut diharapkan akan menunjang sarana dan prasarana di sekitar objek wisata.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan serta mengelola tempat wisata alam Pangandaran belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu bisa dilihat dari kapasitas kemampuan sumber daya manusia yang terbatas. Dalam hal ini keterbatasan tersebut terletak pada kurangnya pengetahuan atau tingkat pendidikan dan skill yang dimiliki oleh sebagian besar pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal pengelolaan dan manajemen pariwisata.

Dari matriks SWOT didapat strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kawasan wisata dalam meningkatkan pengembangan obyek wisata Pangandaran sebagai berikut :

#### Strategi S-O

- Lebih mengembangkan kreatifitas event-event yang dilakukan di kawasan wisata melalui kebijakan pemerintah dalam kalender wisata tahunan.
- Mendorong Kompepar untuk lebih kreatif dalam mengemas hasil usahanya agar tidak muncul keseragaman produk tanpa mengesampingkan ciri khas dari daerah wisata, salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- Adanya pembelajaran bahasa asing oleh lembaga internasional terhadap masyarakat sekitar yang difasilitasi oleh pemerintah setempat.
- Lebih mengembangkan dan menggali keunikan objek wisata Pangandaran serta memasukannya ke dalam program promosi pemerintah pusat visit Indonesia untuk memperkenalkan dan meningkatkan wisatawan.
- Mengembangkan kreatifitas masyarakat melalui Kompepar sehingga dapat membuat usaha-usaha yang baru di sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### Strategi S-T

- Bekerjasama dengan lembaga internasional yang memiliki pengetahuan dalam manajemen peringatan saat bencana serta pengembangan potensi daerah melalui peran masyarakat.
- Mempertahankan keunikan yang dimiliki kawasan wisata kepada wisatawan untuk menghadapi daya saing dengan objek wisata di daerah lain.
- Mengadakan event-event lain yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

#### Strategi W-O

- Lebih meningkatkan promosi hasil karya cinderamata khas Pangandaran dalam bazar wisata agar dapat menarik minat investor.



- Lebih mempromosikan lagi potensi kawasan wisata kepada investor asing untuk mau menanamkan modalnya dan mengembangkan kawasan wisata Pangandaran mejadi lebih baik.
- Pemerintah daerah beserta masyarakat harus dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam hal penanaman modal, sehingga para investor akan tertarik menanamkan modalnya khususnya di bidang pariwisata.
- Mengembangkan kreatifitas masyarakat melalui Kompepar sehingga dapat membuat usaha-usaha yang baru di sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### Strategi W-T

- Penyediaan fasilitas berupa alat peringatan apabila terjadi bencana seperti gempa bumi atau tsunami oleh Pemerintah daerah.
- Melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang bertujuan untuk menyadarkan akan potensi wisata di daerahnya serta meminimalisasi tindakan masyarakat yang dikhawatirkan.

Dari analisis SWOT diatas diperoleh strategi utama yaitu melibatkan masyarakat untuk melakukan kreatifitas dalam membuat berbagai macam event wisata dengan memberikan pendidikan dan pelatihan baik dari program penyuluhan pemerintah daerah maupun bantuan dari lembaga internasional. Kemudian memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pariwisata dengan memanfaatkan kerjasama dengan daerah atau negara lain dalam membangun jaringan pariwisata.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan pariwisata Pangandaran di Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

1. Penataan aparatur pemerintah daerah dengan SDM yang baru, disiplin dan profesional, sangat perlu dikembangkan untuk meningkatkan dalam sebuah usaha memberikan suatu pelayanan yang terbaik dari pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Rotasi sumber daya manusia (aparatur pemerintah daerah) yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan juga sangat mungkin dilakukan dengan maksud untuk penyegaran dan menghindari praktik yang tidak baik dalam melakukan tugasnya.
2. Di masa mendatang diharapkan ada kesesuaian antara perencanaan dengan sumber daya yang tersedia. Dukungan dana selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan wisata di Pangandaran. Permasalahan ini sebenarnya dapat terpecahkan bila promosi wisata yang selama ini dilakukan juga dengan promosi potensi wisata yang belum tergali, sehingga dapat ditawarkan kepada investor untuk memberikan gambaran riil potensi yang tersedia. Hal ini dapat diupayakan dengan menawarkan pada pameran wisata di tingkat nasional maupun regional (ASEAN).

3. Memberikan kemudahan mekanisme perijinan dan birokrasi kepada para pelaku usaha pariwisata atau investor. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya dari Dinas Pariwisata saja, tetapi juga dari Dinas, Kantor, maupun Badan pemerintah Kabupaten Ciamis untuk bersama-sama mengembangkan iklim investasi yang nyaman, meyakinkan, dan menguntungkan.
4. Membuat network jaringan wisata ke tempat lain yang berdekatan, misalnya pemerintah menyediakan bus khusus yang membawa penumpang berkeliling ke tempat wisata lain di sekitar Pangandaran dengan membayar ongkos yang lebih murah.
5. Lebih mengembangkan wisata kuliner yang berbentuk buah tangan khas Pangandaran. Sehingga ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Pangandaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Danim, Sudarmawan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, Quinn Michael. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Salusu. (2008). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta : Grasindo.
- Spillane, James J. (1993). *Ekonomi Pariwisata : Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Subagyo, Joko. (2003). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suwantoro, Gamal. (2004). *Dasar – Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI
- Ulber, Silalahi. (2002). *Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Yoeti, Oka A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

## **Sumber Lain :**

Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.